



MANAJEMEN BENCANA NON ALAM COVID-19 DILIHAT DARI KEPEMIMPINAN *QUADRUPLE HELIX* DI KOTA MATARAM

Inka Nusamuda Pratama¹, Ayatullah Hadi², Ilham Zitri³

¹²³Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 21 Juni 2021
Disetujui 04 September 2021
Dipublikasikan 10 September 2021

Kata Kunci:
Manajemen,
Bencana Non-
Alam,
Covid-19,
Quadruple Helix

Abstrak

Kajian dalam penelitian ini ingin mengetahui terkait dengan peran kepemimpinan *Quadruple Helix* dalam Manajemen Bencana (*Disaster Management*) non alam Covid-19 pada Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepemimpinan *Quadruple Helix* merupakan bentuk kapasitas pemimpin yang merupakan aktor yang berhasil melakukan kolaborasi dalam melakukan respon bencana. Model kepemimpinan *Quadruple Helix* dalam Negara kesatuan Otonomi Daerah bisa dilaksanakan dengan Pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan melaksanakan sosialisasi, kemudian Akademisi bertugas membuat penelitian dan mengeluarkan produk inovasi terbarunya, sedangkan Bisnis atau Swasta berperan sebagai penyokong dana, serta Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mendukung kebijakan. Bentuk kerjasama aktif Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi dan masyarakat merupakan basis dari sistem manajemen bencana non alam Covid-19 sebagai upaya penanganan dan mitigasi. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara kepada *stakeholder* terkait. Hasil dalam penelitian ini Manajemen bencana non alam Covid-19 di Kota Mataram dengan menggunakan model *Quadruple Helix* berjalan secara baik. Kerjasama dari keempatnya (Pemerintah, Akademisi, Bisnis/Swasta dan Masyarakat) mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Kolaborasi dari seluruh *Helix* yang ada dibutuhkan untuk terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi dibidang pengetahuan, formulasi kebijakan yang ideal dan tepat sasaran, support bantuan dan sumbangan berbentuk logistik serta alat kesehatan, dan mutual understanding dari masyarakat yang mampu memberikan dampak positif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Mataram

NON-NATURAL DISASTER MANAGEMENT COVID-19 VIEW FROM *QUADRUPLE HELIX* LEADERSHIP IN MATARAM CITY

Abstract

Keywords:
Management,
Non-Natural
Disasters, Covid-
19, *Quadruple Helix*.

The study in this study wanted to know about the leadership role of the Quadruple Helix in Covid-19 non-natural Disaster Management in Mataram City, West Nusa Tenggara Province. Quadruple Helix leadership is a form of leader capacity who is an actor who has successfully collaborated in disaster response. The Quadruple Helix leadership model in the Unitary State of Regional Autonomy can be implemented with the Government acting as a regulator and

implementing socialization, then Academics are tasked with making research and issuing their latest innovation products, while Business or Private plays a role as fund support, and the Community participates in supporting policies. The form of active collaboration between the Government, the private sector, universities and the community is the basis of the Covid-19 non-natural disaster management system as an effort to handle and mitigate. The method used in this study is qualitative research with interview data collection techniques to related stakeholders. The results in this study were the management of non-natural Covid-19 disasters in Mataram City using the Quadruple Helix model running well. The cooperation of the four (Government, Academics, Business/Private and Community) was able to suppress the spread of Covid-19 in Mataram City. Collaboration from all existing Helix is needed to continue to encourage the birth of innovations in the field of knowledge, formulation of ideal and targeted policies, support for assistance and donations in the form of logistics and medical devices, and mutual understanding from the community that is able to have a positive impact in suppressing the spread of Covid -19 in Mataram City

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi: inka.nusamuda@ummat.ac.id, ayatullah@yahoo.co.id,
ilham.zitri@ummat.ac.id

PENDAHULUAN

Kota Mataram ditetapkan sebagai Zona Merah penyebaran Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipertengahan April 2020. Tak pelak, Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Kota Mataram yang terdiri dari sejumlah unsur wilayah langsung bersiaga. Pasalnya memang tak bisa dianggap enteng, penyebaran Covid-19 di Kota Mataram tertinggi dari 10 Kabupaten atau Kota dan sudah menyebar di enam Kecamatan yang ada (*Website PU Kota Mataram*).

Saat itu Wali Kota Mataram Ahyar Abduh memang bertindak sangat cepat untuk Kota terpadat di Nusa Tenggara Barat ini. Melalui Surat Keputusan Nomor 574/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam COVID-19 Kota Mataram Tahun 2020. Maklum saja, peluang penyebaran Covid-19 amat tinggi di wilayah dengan tingkat kepadatan 7.643 orang per kilometer persegi itu, atau di areal seluas 61,30 km² dengan total jumlah penduduk mencapai 477.476 jiwa tersebut (*Website PU Kota Mataram*).

Data terkini pertanggal 12 Januari 2021 Kota Mataram menjadi daerah tertinggi kasus penyebaran virus corona (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari data Pemprov NTB, kasus Covid-19 di Mataram mencapai 716 pasien dengan jumlah korban meninggal 48 orang. Diperingkat dua, Kabupaten Lombok Barat dengan 362 kasus positif Covid 19 dan 23 orang meninggal. Kota Mataram masuk zona merah penyebaran virus corona. Pemprov NTB bersama Forkopimda menjadikan Mataram skala prioritas penanganan Covid-19 (*Website Corona NTB Prov*).

Dari pernyataan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat “Terus bertambahnya kasus sebaran Covid-19 di Kota Mataram ini menjadi atensi kami (Pemprov NTB) agar bisa secepatnya ditangani, saatnya menerapkan '*punishment*' jika mau jualan atau masuk pasar harus menggunakan masker, apabila tidak diikuti jangan masuk pasar, itu konsekuensinya. Disamping itu Rohmi juga mengedukasi para pengunjung pasar agar dapat menggunakan masker dengan baik. Masker harus menutupi mulut dan hidung. Karena virus ini masuk ke tubuh melalui hidung dan mulut “Jangan pakai masker didagu atau dibawah hidung” (*Regional inews.id*).

Wakil Gubernur juga berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendisiplinkan para pedagang dan pengunjung pasar tradisional untuk menggunakan masker. ketegasan yang dilakukan Pemerintah bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat, tetapi untuk melindungi seluruh masyarakat di NTB dari penyebaran wabah Covid-19, sehingga dapat hidup aman dan terus produktif. Selama ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta aparat TNI/Polri tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan imbauan, mulai dari imbauan yang humanis hingga tegas. Pemerintah telah membagikan ribuan masker, mengajak dan mengimbau disetiap lokasi keramaian, hingga pelosok Desa untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi. Namun seiring waktu, kasus penyebaran Covid-19 tetap saja terus merangkak naik di NTB Terutama wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Terungkap adanya fakta bahwa, buruknya manajemen penanganan Covid-19 di Kota Mataram, ini terbukti dari adanya sidak yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, dari pengadaan masker yang minim, sampai pada pencampuran klorin dalam cairan disinfektan tanpa pengukuran akurat. Tak heran jika Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram menilai bahwa upaya pencegahan penularan covid-19 di Kota Mataram terkesan main-main. Hal ini berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Seperti diketahui, Pemkot Mataram

mengalokasikan sekitar Rp. 135 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Mataram (*Suara NTB*). Ini membuktikan bahwa buruknya upaya penanganan dan mitigasi bencana non alam Covid-19 di Kota Mataram.

Pandemi Covid-19 termasuk bencana darurat, karena faktor non alam. Darurat Bencana merujuk pada peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebabnya dapat berupa faktor alam, non alam, atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, atau dampak psikologis. Ketika bencana non-alam terjadi, implementasi penanganan bencana dilapangan memerlukan kesiapan dari para pihak yang terlibat di lokasi bencana non alam. Dampak bencana non alam memang tidak dapat diprediksi yang akan dialami disuatu daerah. Bencana non alam adalah sesuatu yang bersifat kompleks, dan ketika bencana non alam terjadi bisa saja suasana menjadi *chaos* dan tidak terkendali sama sekali. Akan tetapi dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh berbagai elemen akan mampu mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Bisa saja pelatihan organisasi lokal dalam mitigasi bencana dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mengurangi dampak yang lebih besar. Namun demikian apabila ternyata bencana non alam yang datang lebih besar dan diluar prediksi, bisa jadi masyarakat lokal malah akan tergantung dengan pihak luar (Yumantoko, 2019).

Pemerintah dalam merespon upaya bantuan bencana, memerlukan dukungan dari organisasi–organisasi pemberi bantuan, seperti yang dikemukakan oleh Helsloot dan Ruitenbergh (2004), bahwa Pemerintah dimana bencana terjadi tidak mungkin mampu untuk merespon segala aspek dalam upaya respon dan pemulihan bencana secara sendirian. Upaya respon dan pemulihan bencana non alam tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun juga direspon oleh *Non Governmental Organizations* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan–perusahaan, lembaga dan institusi swasta, militer, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dari daerah lain.

Kepemimpinan “*Quadruple Helix*” untuk menggambarkan konstruksi ideal memiliki sinergi antara:

- 1) Kalangan *Government* atau Pemerintahan yang membuat regulasi atau Undang-Undang agar semua berjalan dengan lancar, sinergisitas, konstruktif, dan bermartabat.
- 2) Kalangan Bisnis atau Swasta yang menggunakan hasil riset dan Sumber Daya Manusia tersebut.

- 3) Kalangan akademisi yang memproduksi riset dan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam bidang sains dan teknologi.
- 4) Masyarakat sebagai basis dari sistem manajemen bencana, berhasilnya kebijakan ditentukan seberapa kuatnya masyarakat dalam membantu instrumen kebijakan yang ada.

Masing-masing aktor berperan secara dinamis dan bersinergi dalam membentuk satu kesatuan yang merupakan jejaring peran dalam melakukan implementasi aktivitas manajemen bencana (Tubagus Furqon Sofhani, 2017).

Adapun urgensi dari penelitian ini yaitu ingin melihat upaya penanganan dan mitigasi bencana non alam *Covid-19* dilihat dari kepemimpinan *Quadruple Helix* di Kota Mataram. Disamping penelitian ini akan menambah hazanah solusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, juga akan menambah modul terapan dalam pola kepemimpinan disektor publik yang akan langsung bisa diterapkan didalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang sedang membutuhkan model kepemimpinan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen bencana non alam *Covid-19* Dilihat dari kepemimpinan *Quadruple Helix* di Kota Mataram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau dari keterangan pihak Pemerintah Kota Mataram, PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Universitas Muhammadiyah Mataram, Masyarakat Kota Mataram. Selain itu juga didukung data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen Manajemen *Covid-19* di Kota Mataram, publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, media cetak maupun online terkait dengan upaya-upaya penanggulangan bencana Non alam *Covid-19* di Kota Mataram. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi (documentation). Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan modelinteraktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Mataram ditetapkan sebagai Zona Merah penyebaran *coronavirus*, *Covid-19*, di Provinsi Nusa Tenggara Barat di pertengahan April 2020. Tak pelak, Gugus Tugas Penanganan Pencegahan *Covid-19* Kota Mataram yang terdiri dari sejumlah

unsur wilayah langsung bersiaga. Pasalnya memang tak bisa dianggap enteng, penyebaran Covid-19 di Kota Mataram tertinggi dari 10 kabupaten atau kota dan sudah menyebar di enam kecamatan yang ada.

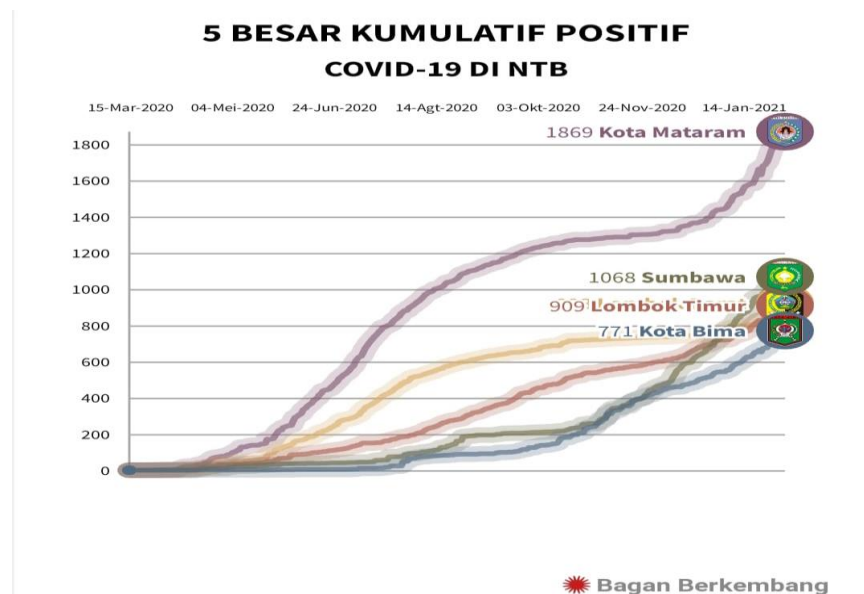
Data pertanggal 04 Juni 2021 pukul 22.08 Wita, yang dikutip dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat:

Tabel 1
Covid-19 Di Nusa Tenggara Barat (04 Juni 2021)

Rawat	Sembuh	Meninggal	Jumlah
500 (3.66%)	12.574 (91.93%)	604 (4.42%)	13.678

Sumber: Dinas Kesehatan NTB, 2020

Gambar. 1



Sumber: <https://corona.ntbprov.go.id/>

Dari table.1 yang dikutip dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan bahwa jumlah pasien yang dirawat Covid-19 berjumlah 500 orang atau persentase sebesar 3.66%. Sementara untuk pasien yang telah sembuh berjumlah 12.574 orang dengan persentase 91.93%. Kemudian pasien yang meninggal akibat terpapar Covid-19 di Nusa Tenggara Barat berjumlah 604 orang dengan persentase 4.42%. Sementara itu dari gambar 5.1 jumlah kumulatif positif Covid-19 di NTB dengan persebaran 5 daerah tertinggi pertanggal 04 Juni 2021 pukul 22.08 Wita, dapat dilihat bahwa Kota Mataram tertinggi dengan angka 1869 orang, kemudian Sumbawa berjumlah 1068 orang, lalu ada Lombok Barat dengan jumlah 993 orang, selanjutnya

Lombok Timur 909 orang, dan disusul Kota Bima dengan jumlah 771 orang. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, artinya Kota Mataram masih tertinggi kasus Covid-19.

1. Pemerintah

Pemerintah Kota Mataram (Helix pertama), mendesain sebuah kebijakan kegiatan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL), sebagai upaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Mataram. Untuk mensukseskan kebijakan dengan pendekatan lingkungan tersebut, Pemerintah Kota Mataram sebagai langkah awal melalui kegiatan PCBL telah mendistribusikan berbagai alat pendukung kepada perwakilan 325 kepala lingkungan se-Kota Mataram. Penangan dan pencegahan Covid-19 menggunakan skema PCBL dinilai lebih efektif. Skema tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencengah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang:

"Melanjutkan instruksi pak Wali Kota Mataram, ini semua dilakukan sebagai ikhtiar lewat kebijakan yang bersifat kearifan lokal, Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) di Kota Mataram, diharapkan kepada seluruh kepala lingkungan dan masyarakat Kota Mataram, dapat memutus penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing dengan memperketat pengawasan protokol penanganan Covid-19. Pemkot Mataram sendiri mengalokasikan anggaran 45 Milyar rupiah untuk penanganan covid-19. Anggaran ini selain untuk membantu warga terdampak dengan menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial juga untuk membeli sejumlah peralatan pencegahan covid-19. PCBL membutuhkan peran seluruh komponen yang ada di masyarakat, unsur TNI, Polri, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat di lingkungan, serta mengoptimalkan kader pelayanan terpadu Kota Mataram, yang saat ini berjumlah 1.200 orang. Secara konsep, PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya)". Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) merupakan masukan dari teman-teman akademisi, Kota Mataram merupakan salah satu daerah yang tidak memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena menurut teman-teman akademisi pencegahan Covid-19 dari lingkungan adalah kunci untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Maka dari itu dengan mempertimbangkan dari seluruh aspek, akhirnya Kota Mataram resmi memberlakukan PCBL.

Dari hasil wawancara dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram dapat disimpulkan bahwa, manajemen Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram (Helix pertama) sebagai upaya memutus mata rantai Covid-19 yaitu dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCovid19BL). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk

mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada di masyarakat, unsur TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik.

Pemerintah Kota Mataram dalam konsep Quadruple Helix sebagai pembuat regulasi sosialisasi dan memformulasikan kebijakan dari permasalahan Covid-19 di Kota Mataram. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram harus mampu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kondisi dan program yang akan dilaksanakan. Membahas tahapan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) diantaranya persiapan teknis dan kebutuhan setiap lingkungan, seperti tempat cuci tangan harus tersedia diseluruh lingkungan yang berada di Kota Mataram, *thermoscan*, cairan disinfektan, serta kebutuhan lainnya yang dianggap penting untuk memutus mata rantai penyebarab Covid-19 di Kota Mataram. Selain itu, program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) merupakan masukan dari pihak akademisi, karena saat itu Kota Mataram lebih memilih Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dari pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mempertimbangkan dari segala aspek. Pencegahan penyebaran dari lingkungan (PCBL) dianggap paling penting, karena strategi ini dianggap akan menyentuh langsung masyarakat pada lapisan yang paling bawah.

2. Akademisi

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) sebagai Helix kedua (Akademisi) ikut serta mengambil bagian dalam menangani pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Ini dapat dilihat dari Tim pengabdian dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian (FAPERTA) menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan dengan tema pengolahan produk berbasis kelor untuk meningkatkan imunitas menghadapi pandemi Covid-19.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua tim pelaksana pengabdian Universitas Muhammadiyah Mataram, Nurhayati menjelaskan bahwa:

“Tujuan diadakannya penyuluhan dan pelatihan ini adalah karena salah satu cara dalam mencegah Covid-19 adalah dengan melakukan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kelor merupakan salah satu komoditas pangan yang mudah dijumpai namun banyak masyarakat yang belum mengetahui keunggulan dari tanaman tersebut. Nutrisi yang bisa didapat dari kelor sesungguhnya sangat melimpah, namun kebanyakan masyarakat hanya mengolah kelor menjadi sayur bening lalu dimakan dengan nasi. Maka dari itu kami adakan pelatihan agar masyarakat dapat mengolah kelor dengan berbagai cara”.

Dari hasil wawancara dengan Ketua tim pelaksana pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram dapat disimpulkan bahwa, inovasi

yang dilakukan Helix kedua (Akademisi) sebagai upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan pengolahan produk berbasis kelor. Kegiatan ini dilakukan dikarenakan minimnya pengetahuan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Mataram terkait dengan khasiat yang ada pada daun kelor sebagai penangkal Covid-19. Inovasi ini didapatkan, karena daun kelor mengandung nutrisi yang sangat melimpah yang baik untuk kesehatan tubuh. Dari adanya inovasi dalam bidang pengetahuan ini, diharapkan kepada Pemerintah Kota Mataram untuk mampu mengakomodir dan mensupport sekecil apapun temuan yang bermanfaat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram.

3. Bisnis (Swasta)

Untuk berperang dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Mataram dibutuhkan kerja sama antar semua pihak. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebagai Helix ketiga (Bisnis/Swasta), memberikan support dan dukungan dalam bentuk sumbangan logistik dan alat kesehatan kepada Pemerintah Kota Mataram. Bantuan tersebut berupa *thermometer termogun* 2 unit, masker 6.500 pcs, sarung tangan 200 pasang, sepatu karet 40 pasang, sabun cuci tangan 150 pcs dan vitamin C 2.100 tablet.

Kolaborasi seluruh pihak, termasuk sektor swasta adalah ikhtiar kerja kolektif, bahwa memutus mata rantai Covid-19 menjadi tugas bersama. Seperti halnya wawancara dengan pihak PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT):

“PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah berkomitmen untuk terus membantu Pemerintah memutus mata rantai pandemi Covid-19. Kamipun secara internal, baik perusahaan dan juga karyawan selalu menerapkan protokol Covid-19 yang sangat ketat, ini sebagai bentuk menjaga dan memutus penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mendistribusikan bantuan serupa untuk 4 kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah ini membuktikan keseriusan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menjadi mitra terbaik Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

Hasil wawancara dengan pihak PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dapat disimpulkan bahwa komitmen yang dibangun merupakan manifestasi memutus mata rantai pandemi Covid-19 di Kota Mataram. Peran PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tidak sampai disitu, dikutip dari website resmi *amman.co.id* Tambang Batu Hijau milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman) menjadi kontributor utama pada pertumbuhan sektor pertambangan di Nusa Tenggara Barat. Di masa pandemi Covid-19, produktivitas Amman justru meningkat, melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam upaya melindungi karyawannya. Pada periode

tersebut, Amman berhasil meningkatkan produktivitas termasuk produktivitas operasional shovel hingga 46 persen dan truk hingga 25 persen.

Menurut Kartika Octaviana, *Head of Corporate Communications* PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dikutip dari *amman.co.id*:

“Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di tambang Batu Hijau menjadi kunci untuk mencegah penyebaran virus ke dalam site, sehingga kami bisa meningkatkan produktivitas dengan rasa aman. Kami sangat bangga melihat seluruh karyawan dan mitra bisnis yang begitu mendukung dan adaptif terhadap situasi ini.”

Dari hasil pernyataan *Head of Corporate Communications* Amman PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dapat disimpulkan bahwa, sebagai bagian dari protokol pencegahan Covid-19, seluruh karyawan dan mitra bisnis wajib melalui karantina mandiri selama 2 minggu di fasilitas yang telah disediakan perusahaan sebelum memasuki tambang Batu Hijau. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) bekerja sama dengan sejumlah hotel yang ada di Kota Mataram untuk fasilitas isolasi mandiri terpusat ini. Kolaborasi tersebut juga dapat membantu roda perekonomian lokal di bidang pariwisata yang sangat terdampak pandemi. Sejumlah tes *skrining* Covid-19 juga dilakukan agar dapat dipastikan bahwa semua orang yang memasuki site Batu Hijau berada dalam kondisi sehat dan bebas dari Covid-19. Dengan berbagai protokol kesehatan ini, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehingga memotivasi seluruh karyawan untuk berkontribusi terbaik dalam pekerjaan.

4. Masyarakat

Delman & Madsen (2007) menyatakan bahwa organisasi helix ke-empat yang mengarah ke struktur Quadruple Helix adalah organisasi independen, nonprofit dan berbasis anggota. Helix keempat ini berperan sebagai fasilitator antara ketiga helix lainnya. Mereka biasanya bersifat independen, organisasi nonprofit dan mengungkit investasi swasta dan publik untuk bersama-sama mendanai program penelitian dan pengembangan, dan menyediakan layanan teknis produk dan jasa.

Masyarakat sipil dapat menjadi sumber daya untuk pasar, aktivitas perusahaan dan komersial, dan sebagai jalan perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap permintaan pasar tanpa risiko terkait dengan pengembangan produk. Yawson (2009) menyatakan bahwa inovasi muncul karena kebutuhan dari pengguna (*user-driven innovation*) sehingga pengguna diformalisasikan sebagai helix ke-empat.

Tabel 2
Spektrum Partisipasi Publik Dalam Memutus Mata Rantai Covid-19
Di Kota Mataram

	Informasi (Inform)	Konsultasi (Consult)	Pelibatan (Involve)	Kerjasama (Collaborate)	Memberdayakan (Empower)
Tujuan	Menyediakan informasi yang obyektif dan seimbang, membantu memahami dan mencari alternatif solusi terhadap masalah	Mendapatkan masukan masyarakat terkait analisis, alternatif, dan atau sebuah keputusan.	Bekerja secara langsung dengan masyarakat melalui sebuah proses untuk memastikan aspirasi masyarakat secara konsisten dipertimbangkan.	Bermitra dengan masyarakat di setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk mengidentifikasi dan membangun solusi alternatif.	Menempatkan pembuatan keputusan final di tangan masyarakat.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada lima tingkat partisipasi publik dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram, dari yang paling rendah yakni *inform* (menginformasikan kepada masyarakat) merupakan tugas Pemerintah Kota Mataram untuk mensosialisasikan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCovid19BL), setelah itu meningkat menjadi *consult* (konsultasi dengan masyarakat agar mendapatkan masukan yang ideal dalam upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram), *involve* (melibatkan masyarakat untuk berkerjasama memutus mata rantai Covid-19), *collaborate* (Pemerintah Kota Mataram berkolaborasi bersama masyarakat untuk sama-sama menekan laju penyebaran Covid-19), dan yang paling tinggi adalah *empower* (memberdayakan masyarakat Kota Mataram dalam perumusan kebijakan publik). Dalam merespon perkembangan wabah Covid-19 yang sangat cepat dan kompleks ini, spektrum diatas telah diterapkan dalam manajemen bencana non alam Covid-19 di Kota Mataram.

Idealnya, partisipasi publik bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dalam konteks darurat penanganan dan pencegahan Covid-19, partisipasi publik juga bertujuan melibatkan publik untuk menerapkan pendekatan

pencegahan Covid-19 melalui *social distancing* dan *stay at home*. Yang pertama merupakan partisipasi publik aktif dan kedua merupakan partisipasi publik pasif. Kedua pendekatan partisipasi publik tersebut, baik partisipasi publik aktif maupun partisipasi publik pasif, perlu digunakan oleh pemerintah untuk memastikan efektifitas sebuah kebijakan.

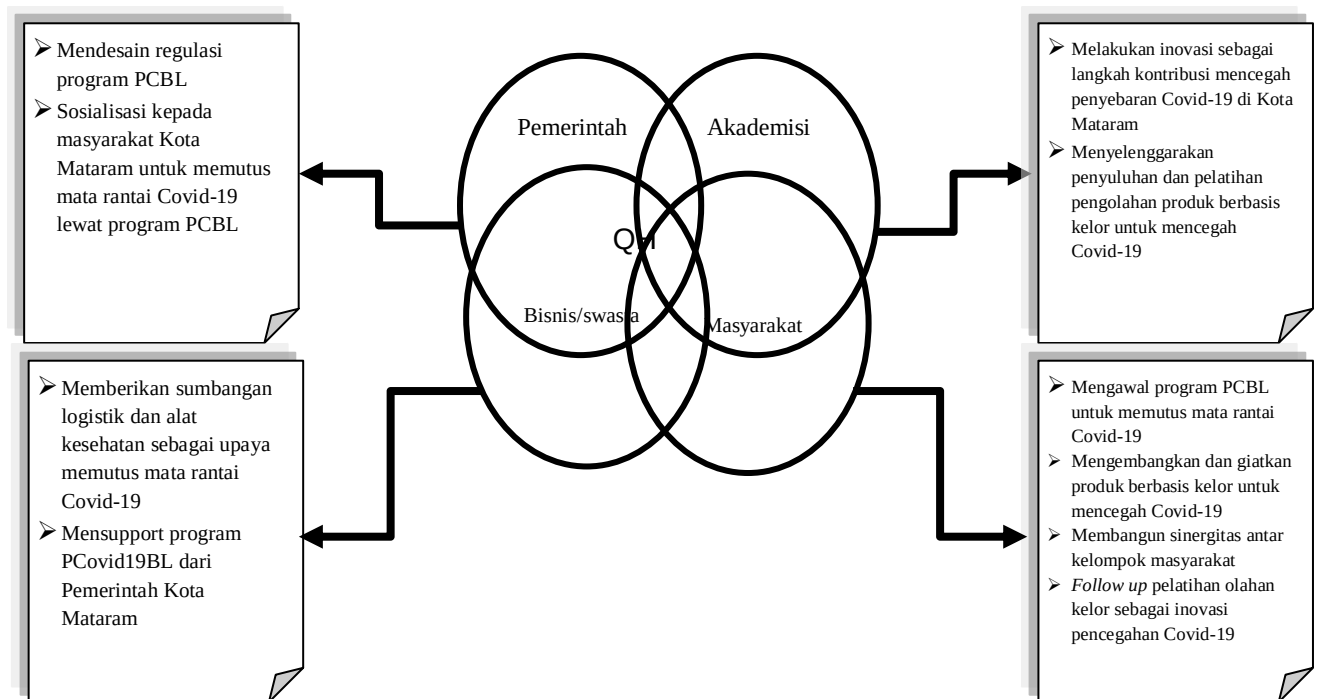
Dalam partisipasi publik aktif, Pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat tentang pilihan-pilihan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Karena bagaimanapun, Pemerintah juga mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman. Dalam kondisi ini, melibatkan masyarakat (sesuai spektrum di atas) menjadi sebuah kebutuhan, jika dan hanya jika pemerintah mau membuka diri terhadap masyarakat.

Sementara untuk partisipasi pasif, tantangannya adalah bagaimana Pemerintah bisa memastikan masyarakat berpartisipasi dalam menerapkan kebijakan dan pendekatan pencegahan Covid-19, khususnya *social distancing* dan *stay at home*. Dalam konteks ini, Pemerintah bisa menggunakan kekuasaannya melalui kontrol alat-alat Negara untuk memastikan masyarakat berpartisipasi dalam *social distancing* dan *stays at home* ini. Tanpa adanya kontrol negara yang memadai, partisipasi masyarakat dalam *social distancing* dan *stays at home* tidak mudah untuk diimplementasikan.

5. Kolaboratif Kepemimpinan Quadruple Helix di Kota Mataram

Setiap aktor dalam Quadruple Helix memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kompetensi dan kemampuan pada bidangnya masing-masing. Namun sebagai konsekuensi sistem, seluruh aktor harus berkolaborasi sebagai satu kesatuan yang solid. Sinergi antar aktor yang ada dapat tercipta apabila setiap aktor dapat memainkan peranannya masing-masing tanpa bergantung pada aktor lainnya (Sofhani dan Nurrahma, 2017). Gambar dibawah ini akan menyajikan bentuk kolaborasi hingga sinergisitas antar empat aktor Quadruple Helix pada manajemen bencana non alam Covid-19 di Kota Mataram.

Gambar. 2
Bentuk Kepemimpinan Empat Aktor Quadruple Helix di Kota Mataram



PENUTUP

Manajemen bencana non alam Covid-19 di Kota Mataram dengan menggunakan model Quadruple Helix berjalan secara baik. Kerjasama dari keempatnya (Pemerintah, Akademisi, Bisnis/Swasta dan Masyarakat) mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Kolaborasi dari seluruh Helix yang ada dibutuhkan untuk terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi dibidang pengetahuan, formulasi kebijakan yang ideal dan tepat sasaran, support bantuan dan sumbangan berbentuk logistik serta alat kesehatan, dan *mutual understanding* dari masyarakat yang mampu memberikan dampak positif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mahfud, (2003). *"Money politics dalam Pilkada"*, Jurnal Hukum, Volume XII, No. 2, Hlm. 227-234
- Amrullah M. Arief. (2004). Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dan. *Jurnal Hukum*, vol.11, 119–130.
- Carayannis, E. G., and Campbell, D. F. J. (2009). Mode 3 and Quadruple Helix: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International journal of Technology Management*, 46 (3), 201-234.
- Delman, J., & Madsen, ST.(2007),Nordic triple helix collaboration in knowledge,

- innovation, and business in China and India: a preliminary study. NIAS-Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen
- Dwipayana, AAGN Ari. (2013). *Pembiayaan Gotong Royong : Studi Tentang Dinamika Pembiayaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada periode 1993 – 1999 (Ringkasan Desertasi)*. Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM : Yogyakarta.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada
- Faisal, Bariroh, B., & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Integritas*, 4(1), 265–287.
- Fitriyah. (2011). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Jurnal Ilmu Politik*, 1–10.
- Fuad, A. B. B. (2014). Political Identity and Election in Indonesian Democracy: A Case Study in Karang Pandan Village – Malang, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 477–485.
- Radar Semarang, Realitas Biaya Politik. (2018).
<http://radarsemarang.com/2018/05/29/bayar-saksi-di-tps-butuh-rp-15-m/>
 diakses pada 4 Januari 2020 19:14).
- Rahayu, Sri. (2013), “The Quadruple Helix Model (Universities, Academic, Entreprises, Government and Community) Sebagai Model Ideal Untuk Sistem Inovasi Lokal Efektif Terkait Penanggulangan Kemiskinan Di Negara Berkembang”, Pusat Penelitian Perkembangan Iptek-LIPI, 2013.
- Schroder, P. (2000). *Politische Strategien. First Edition. Nomos. Baden-Baden*. Terjemahan FNF. 2013. Strategi Politik. Edisi Pertama.
- Syawawi, Reza. Kutukan Dana Politik. *Kompas*, 26 November 2018.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang *Partai Politik*.
- Yawson, R. M. (2009), The Ecological System of Innovation: A New Architectural Framework for a Functional Evidence-Based Platform for Science and Innovation Policy, The Future of Innovation, Proceedings of the XXIV ISPIM 2009 Conference, Vienna, Austria, June 21–24, 2009.
- Bantuan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara <https://www.ntbprov.go.id/post/tangani-covid-19-pemprov-ntb-terima-dukungan-pt-amnt> diakses pada 15 Mei 2021
- Partisipasi Publik Dalam Penanganan Covid-19 <https://iap2.or.id/covid-19/> diakses pada 15 Mei 2021
- Program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan
<https://www.antaranews.com/berita/1471197/penanganan-covid-19-berbasis-lingkungan-dicanangkan-di-mataram-ntb> diakses pada 15 Mei 2021
- Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi
<https://www.amman.co.id/id/news/mining-sector-helped-to-sustain-ntbs-economy->

[during-covid-19-pandemic/](#) diakses pada 15 Mei 2021.